

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah kesejahteraan sampai saat ini merupakan tugas pemerintah yang masih belum selesai, kinerja pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan rakyatnya belum pernah mencapai taraf yang memuaskan, kemiskinan masih merupakan problematika sosial yang masih berlanjut dan belum ada penyelesaian. Salah satu penyebab dari tingginya angka kemiskinan dalam suatu negara adalah peluang dan kesempatan kerja yang sedikit dalam negara tersebut.

Kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang masih memprihatinkan ditandai dengan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki kondisi kemiskinan, pengangguran, dan dunia pendidikan yang belum dapat diakses oleh seluruh masyarakat, lapangan pekerjaan yang minim dan masalah kesejahteraan yang sampai saat ini masih belum pernah selesai. Hal ini menyebabkan angka pengangguran di Indonesia meningkat karna kesempatan bekerja yang kecil, jumlah pencari kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang luas membuat masyarakat Indonesia termotivasi untuk melakukan migrasi dan mencari kerja di luar negeri sebagai buruh migran untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Sebagiaian orang melakukan migrasi karena menginginkan standar kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri dan untuk keluarga mereka mereka, termasuk pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan yang besar.

Salah satu cara pemerintah untuk memberdayakan tenaga kerja masyarakat Indonesia yaitu melalui kebijakan mengirimkan buruh migran Indonesia ke luar negeri. Buruh migran adalah penopang devisa negara terbesar dan menjadi salah satu program utama pembangunan ketenagakerjaan Indonesia, berbicara mengenai buruh migran Indonesia masih belum banyak yang berubah selain menciptakan devisa untuk negara buruh migran Indonesia tidak lepas dari banyaknya kasus eksploitasi, diskriminasi, penindasan, dan kekerasan selalu menjadi motif dalam cerita buruh migran Indonesia yang menjadikan buruh migran Indonesia merasa disudutkan.

Beragam persoalan terkait latar belakang pendidikan yang membuat buruh migran Indonesia minimnya mendapatkan informasi perihal ancaman dan bahaya yang akan didapatkan ketika mereka berada dan bekerja di negara lain. dengan segala kerentanan yang ada, buruh migran kerap tidak memiliki posisi yang kuat di mata hukum. Bahkan situasi-situasi yang ada menyebabkan terlanggarnya hak-hak buruh migran sebagai tenaga kerja, sebagai warga negara maupun haknya sebagai manusia. Beberapa kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh buruh migran Indonesia mulai dari penyiksaan, dirazia/dideportasi, diperbudak, terancam hukuman mati, dan meninggal dilautan.

Situasi rentan bahkan tidak hanya terjadi pada fase buruh migran Indonesia ditempatkan di negara tujuan, minimnya akses informasi menyebabkan buruh migran Indonesia terancam menjadi korban perdagangan manusia saat fase pra-pemberangkatan saat fase kepulangan buruh migran Indonesia dengan tidak kemampuan mereka dalam mengelola keuangan mengarahkan mereka masuk pada

rantai persoalan migrasi tenaga kerja. Hal ini diperburuk dengan lemahnya upaya diplomasi maupun produk kebijakan yang disediakan oleh negara untuk melakukan perlindungan kepada buruh migran Indonesia sebagai warga negara yang harus tetap dilindungi.

Peningkatan kasus pada buruh migran Indonesia terletak pada orientasi ketenagakerjaan yang masih mengedepankan cara pandang ekonomi bisnis. Persoalan – persoalan tersebut mengancam buruh migran Indonesia dan menghantui yang akan terus terjadi dan berulang menjadi sorotan publik maupun pihak – pihak non negara yang berfokus pada isu-isu buruh migran Indonesia. Salah satu lembaga masyarakat sipil yang berfokus dalam memperjuangkan hak – hak buruh migran Indonesia adalah Migrant CARE. Migrant CARE telah berjalan mengadvokasi dan memperjuangkan isu – isu buruh migran Indonesia sejak tahun 2004.

Hongkong merupakan salah satu negara pemesan buruh migran perempuan Indonesia. Hongkong banyak diminati oleh buruh migran perempuan Indonesia dengan alasan utamanya di negara tersebut para buruh migran perempuan Indonesia mendapat upah yang tinggi dibandingkan dengan upah di negara Malaysia atau Arab Saudi dan tiap tiap akhir pekan para buruh migran perempuan Indonesia mendapat hari libur satu hari. Alasan lainnya tindak kejahatan yang dilakukan majikan selama ini sangat kecil dibandingkan dengan sikap majikan dari Arab Saudi. Dengan alasan-alasan inilah para buruh migran perempuan Indonesia mencari dollar ke Hongkong. (Evi, 2019).

Permintaan pengiriman buruh migran perempuan Indonesia itu tidak lepas dari murahannya harga buruh migran perempuan Indonesia di Hongkong, terlebih kebanyakan buruh migran perempuan Indonesia memiliki kelemahan yaitu kurang penguasaan dalam pengetahuan dan keterampilan, sebab buruh migran perempuan Indonesia kebanyakan minimnya pendidikan. Persoalan buruh migran perempuan Indonesia semakin hari semakin kompleks. Maraknya ancaman, diskriminasi, eksploitasi, kondisi kerja di negara penempatan, pemulangan, perselisihan, dan pemutusan hubungan kerja, serta tindakan kekerasan oleh majikan mereka membuat buruh migran perempuan Indonesia merasa terintimidasi.

Ada beberapa masalah ekonomi yang dialami oleh pemainnya, terlilit hutang, pemerasan oleh pacarnya, dan ketergantungan hidup antara pasangan sesama jenis, selain itu terdapat kekerasan dan eksploitasi yang terjadi terhadap buruh migran perempuan Indonesia di Hongkong dalam konteks kejahatan seksual persoalan ini yang menjadi kompleks dalam cerita buruh migran perempuan Indonesia, permasalahan – permasalahan *existing* ini sudah lama terjadi dan selalu terulang dan berulang kali dirasakan oleh buruh migran perempuan Indonesia. Dalam cara bergaul dan bersosialisasi buruh migran perempuan Indonesia mempunyai cara bergaul yang berlebihan, terlalu cepat percaya kepada orang yang baru dikenal, dan larut pada budaya baru yang dihadapi.

Adanya eksploitasi dalam konteks kejahatan seksual dapat terjadi bukan dikarenakan dari faktor – faktor kepribadian seseorang atau hawa nafsu dan ambisi seseorang, tetapi faktor lain yang dapat mendorong terjadinya kejahatan seksual pada buruh migran perempuan Indonesia adanya faktor merasa kesepian, trauma

jika tidak mengikuti perintah majikan dan harus mendapat hukuman, ketakutan akan diskriminasi dan ancaman yang dapat membuat kehilangan pekerjaan buruh migran perempuan Indonesia.

Pada tahun 2017 – 2018 terdapat kasus eksploitasi terhadap buruh migran perempuan Indonesia yang mendapatkan tindakan kekerasan seksual oleh majikannya, buruh migran perempuan Indonesia tersebut berjumlah 3 orang dengan inisial S yang berasal dari kota Palembang, W yang berasal dari kota Cianjur dan Y yang berasal dari NTT, mereka mengalami tindak diskriminasi dan eksploitasi seksual mereka mendapatkan tindakan kriminalitas oleh majikannya mereka diperlakukan tidak wajar dalam eksploitasi seksual mereka dijadikan pelampiasan hawa nafsu oleh majikannya berulang ulang kali, dan tidak adanya tindakan yang dapat mereka lakukan sehingga mereka mengalami depresi serta trauma terhadap kejadian yang sudah sering mereka alami, ke tiga buruh migran perempuan Indonesia tersebut tidak mempunyai defense untuk mendapatkan perlindungan dengan kasus yang sudah terjadi terhadap mereka. (Laporan Indonesia kepada Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia Buruh Migran PRT Indonesia: Kerentanan dan inisiatif-inisiatif baru untuk perlindungan hak asasi TKW-PRT, Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan, 2017)

Masalah perlindungan buruh migran perempuan Indonesia dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Perlindungan hak-hak asasi buruh migran Indonesia perlu dibuatkan undang-undang yang tegas memberikan hak-hak buruh migran yang sejalan dengan konvensi internasional tahun 1990. Hak-hak buruh migran Indonesia yang harus dilindungi dalam undang-undang nantinya dapat

menjamin adanya hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dipenuhi hak memperoleh informasi, jaminan keselamatan kerja mulai dari perekrutan, penempatan, dan pemulangan. Migrant CARE lembaga swadaya masyarakat yang dapat memberikan perlindungan terhadap setiap buruh migran Indonesia terlebih dalam kasus diskriminasi dan eksploitasi buru migran Indonesia terjadi lebih besar terhadap buruh migran perempuan Indonesia.

Perlindungan buruh migran perempuan Indonesia di luar negeri mempunyai dua elemen yang saling melengkapi. Elemen pertama adalah diri buruh migran perempuan Indonesia itu sendiri, dalam mempersiapkan diri mereka menghadapi lingkungan pekerjaan. Buruh migran perempuan Indonesia harus mengetahui hak-hak yang seharusnya mereka miliki dan mengetahui cara mempertahankan hak-hak tersebut semakin mudah melindungi mereka. Elemen kedua bersifat eksternal, yakni kondisi dan situasi di negara penerima. Pemerintah Hongkong menetapkan kebijakan yang banyak membantu perlindungan buruh migran perempuan Indonesia, mereka mengharuskan setiap kontrak kerja perlu pengesahan dari konsulat jenderal negara pengirim. Program itu pada intinya dibagi dalam tiga bagian utama, *Welcoming Program*, *During Stay Program*, dan *Exit Program*.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, penulis mengajukan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan “Bagaimana upaya Migrant CARE dalam perlindungan hak-hak buruh migran perempuan Indonesia yang bekerja pada sektor domestik di Hongkong?”.

1.3 Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini adalah analisis terkait upaya yang dilakukan oleh Migrant CARE terhadap perlindungan hak-hak buruh migran perempuan Indonesia di Hongkong. Penelitian ini akan meneliti mengenai upaya yang dilakukan oleh Migrant CARE dalam urgensi perlindungan hak-hak yang harus didapatkan oleh buruh migran perempuan Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Migrant CARE dalam perlindungan hak-hak buruh migran perempuan Indonesia yang bekerja pada sektor domestik di Hongkong

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan kontribusi keilmuan bagi ilmu hubungan internasional tentang upaya Migrant CARE dalam perlindungan hak-hak buruh migran perempuan Indonesia melalui :

1. Dalam menangani kasus eksploitasi dan upaya Migrant CARE dalam perlindungan hak-hak buruh migran perempuan Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi serta sebagai acuan bagi penelitian lebih lanjut, baik bagi akademisi ilmu hubungan internasional maupun program studi lainnya, yang ingin melakukan penelitian serupa.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan gambaran diperlukannya kerja sama penanganan perlindungan hak-hak buruh migran perempuan Indonesia di Hongkong dengan upaya yang dilakukan oleh Migrant CARE.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan yang akan diteliti, pertanyaan penelitian, batasan penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan referensi karya ilmiah yang memiliki tema serupa dengan yang penulis teliti, landasan teoritis yang berisi teori *global civil society* yang penulis ambil untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti, dengan landasan konsep menggunakan hak asasi manusia dan migrasi internasional.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik keabsahan data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil analisa dari data penelitian yang menjadi temuan penulis. Hasil ini disajikan sesuai dengan teori dan konsep yang digunakan. Bab ini akan menjelaskan faktor sosial politik buruh migran perempuan Indonesia terhadap eksploitasi.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup dan kesimpulan dari pembahasan penelitian serta saran dari penulis.